

**PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PERENCANAAN
ANGGARAN, DAN POLITIK PENGANGGARAN DENGAN
TRANSPARANSI PUBLIK SEBAGAI VARIABEL
MODERATING TERHADAP SINKRONISASI
DOKUMEN APBD DENGAN DOKUMEN
KUA-PPAS PADA PEMERINTAH
KOTA PEKANBARU**

**Oleh:
Hendita C Habeahan
Pembimbing : Vince Ratnawati dan Edfan Darlis**

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia
e-mail: henditachristina@yahoo.co.id

*The Influence of the Capacity of Human Resources, Budget Planning and
Budgeting Politics with public transparency as moderating variable toward the
synchronization between Regional Revenues and Expenditures Budget (APBD)
document and General Policy of Regional Revenues and Expenditures Budget
(KUA) - Provisional Budget Ceiling Priority (PPAS) document
in Government of Pekanbaru City*

ABSTRACT

The Purpose of this research is to test influence the capacity of human resources, budget planning and budgeting politics on the synchronization between APBD document and KUA-PPAS document and to test the role of public transparency in moderate the relationship between the capacity of human resources, budget planning, budgeting politics with the synchronization between APBD document and KUA-PPAS document. Sample in this research are employee of SKPD. The sampling technique using purposive sampling method and there are 96 respondents. The data of this research using primary data directly through a questionnaire and analyzed using SPSS 20. The data were analyzed to test the hypothesis using multiple linear regression analysis approach and moderated regression analysis. Result of research show that Capacity of Human Resources, Budget Planning, Political Budgeting have effect on the synchronization between APBD document and KUA-PASS document. Result of the interaction test showed that public transparency could not moderate the relationship between the capacity of human resources, budget planning and budgeting politics and the synchronization between APBD document and KUA-PASS document.

Keywords: Synchronization, Human Resource Capacity, Budget Planning, Budgeting Politics, and Public Transparency

PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat merupakan hal penting dalam

menjalankan pemerintahan. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pemerintah mengeluarkan suatu konsep yang disebut otonomi daerah,

yaitu tiap daerah berhak mengatur kegiatan apa saja yang dapat membangun daerah. Penyusunan program kerja pemerintah daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan daerah, yakni berkaitan dengan penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Penyusunan APBD merupakan proses perencanaan yang bertahap dari penetapan kebijakan pemerintah yang diturunkan hingga teknis kegiatan di masing-masing unit kerja pada organisasi/lembaga. Titik berat pembahasannya adalah sinkronisasi rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat (Iskandar, 2013).

Sinkronisasi antara dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS umum terjadi di setiap pemerintah daerah. Ketika memasuki pembahasan komisi-komisi banyak dijumpai adanya tambahan usulan kegiatan dan permohonan pergeseran anggaran dari satu kegiatan ke kegiatan lain yang pada akhirnya menimbulkan perbedaan yang cukup signifikan antara dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS (Arniati, 2010).

Hal ini terjadi di Kota Pekanbaru, setelah melewati hampir dua bulan pembahasan, akhirnya DPRD dan Pemerintah kota Pekanbaru menyepakati APBD perubahan kota Pekanbaru tahun 2014 menjadi Rp 2,847 Triliun, dengan demikian terdapat kenaikan sekitar Rp 55 milyar dari APBD murni tahun 2014. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan pada belanja sekitar Rp 55 milyar (dipenda.pekanbaru.go.id, 2014).

Keadaan diatas kemungkinan dikarenakan adanya kesalahan dalam proses penganggaran. Apabila anggaran tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun, sehingga menyebabkan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja (Bastian, 2010:191).

Penganggaran melibatkan berbagai pihak yang mempunyai latar belakang berbeda, baik dalam tingkat pemahaman terhadap anggaran maupun kepentingan terhadap anggaran. Perbedaan ini menyebabkan terjadinya ketidaksinkronan dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. (Silvi, 2014).

Disisi lain keterbukaan atau informasi yang didapat oleh publik dalam perencanaan APBD hanya pada awal perencanaan penyusunan APBD melalui musrenbang pada berbagai tingkat. Pada tahap pelaksanaan dan tahap akhir pengelolaan APBD informasi dan keterlibatan publik terputus dan tidak dipublikasikan secara terbuka, artinya publik hanya dilibatkan pada saat musyawarah rencana awal APBD yaitu usulan pembangunan berdasarkan skala prioritas yang langsung diusulkan oleh publik (Iskandar, 2013).

Keterbukaan atau transparansi publik perlu diperhatikan agar perencanaan dan penganggaran bersifat realistis dan tepat sasaran, maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah yang menjabarkan konsep dan ketentuan lebih rinci mengenai kerangka rencana dan anggaran. Namun yang terjadi selama ini perencanaan cenderung mengabaikan dokumen-dokumen

dalam perencanaan dan penganggaran serta tidak adanya keterkaitan antar dokumen (Iskandar, 2013).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Silvi (2014) mengenai pengaruh kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran dan politik penganggaran, dengan transparansi publik sebagai variabel moderating terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS pada Kota Padang. Dari paparan diatas, maka peneliti akan menguji dan menganalisis pengaruh kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran dan politik penganggaran dengan transparansi publik sebagai variabel moderating terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS pada pemerintah kota pekanbaru.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) apakah kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS? 2) Apakah Perencanaan Anggaran berpengaruh terhadap sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS? 3) apakah Politik Penganggaran berpengaruh terhadap sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS? 4) apakah Transparansi Publik mampu memoderasi hubungan kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS? 5) apakah Transparansi Publik mampu memoderasi hubungan Perencanaan Anggaran terhadap sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS? 6) apakah Transparansi Publik mampu memoderasi hubungan Politik Penganggaran terhadap sinkronisasi Dokumen

APBD dengan Dokumen KUA-PPAS.

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui apakah kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS. 2) Untuk mengetahui apakah Perencanaan Anggaran berpengaruh terhadap sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS. 3) Untuk mengetahui apakah Politik Penganggaran berpengaruh terhadap sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS. 4) Untuk mengetahui apakah Transparansi Publik mampu memoderasi hubungan Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS. 5) Untuk mengetahui apakah Transparansi Publik mampu memoderasi hubungan Perencanaan Anggaran terhadap sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS. 6) Untuk mengetahui apakah Transparansi Publik mampu memoderasi hubungan Politik Penganggaran terhadap sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS.

TELAAH PUSTAKA

Sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS

Sinkronisasi adalah hasil kesesuaian antara dokumen kebijakan yang satu dengan dokumen kebijakan yang lain, yaitu dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS (Arniati, 2010).

Tujuan dari sinkronisasi adalah untuk mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran

daerah sesuai dengan landasan pengaturan tentang mekanisme penyusunan perencanaan dan anggaran daerah yang telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan (Rasyid, 2013).

Kapasitas Sumber Daya Manusia

Kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan dari anggota eksekutif maupun legislatif dalam menjalankan fungsi dan perannya masing-masing dalam proses penyusunan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah, agar kegiatan-kegiatan dalam APBD sangat bermanfaat bagi masyarakat (Sihabudin, 2013).

Untuk mencapai perencanaan APBD berkualitas, maka setiap SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang mampu melaksanakannya dan melakukan peremajaan sumber daya manusia dengan melakukan pelatihan-pelatihan tentang pengelolaan keuangan daerah (Iskandar, 2013).

Berdasarkan hasil penelitian Iskandar (2013) menyimpulkan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS yang berarti semakin baik kapasitas sumber daya manusia maka sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS semakin baik. Oleh karena itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H₁: Kapasitas Sumber Daya manusia berpengaruh terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

Perencanaan Anggaran

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui

urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (Bastian, 2006: 32).

Bila perencanaan pada tahapan awal buruk maka akan berdampak pada buruk perencanaan pada tahap berikutnya. Untuk itu pada tahap awal perencanaan merupakan faktor yang sangat menentukan terhadap kesinkronan antara dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. (Iskandar, 2013).

Berdasarkan hasil penelitian Silvi (2014) menyimpulkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS yang berarti semakin baik perencanaan anggaran maka sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS semakin baik. Oleh karena itu, hipotesis kedua dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H₂: Perencanaan anggaran berpengaruh terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

Politik Penganggaran

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik (*politics*) adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat kearah kehidupan bersama yang harmonis. (Budiardjo, 2008: 15).

Dalam Bastian (2006: 39) menyebutkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Dalam organisasi sektor publik pada umumnya, penganggaran merupakan proses politik

Politik penganggaran adalah cara bagaimana mencapai tujuan yang bersifat kolektif dan mengikat

melalui kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik, alokasi dan distribusi dalam proses rencana aktivitas ke dalam rencana keuangan (Iskandar, 2013).

Berdasarkan hasil penelitian Iskandar (2013) dan silvi (2014) menyimpulkan bahwa poltik penganggaran berpengaruh terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS yang berarti semakin baik hubungan politik penganggaran maka sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS semakin baik. Oleh karena itu, hipotesis ketiga dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H₃: Politik penganggaran berpengaruh terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

Transparansi Publik

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat di mengerti dan dipantau. Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu tentang kebijakan publik, dan proses pembentukannya (Iskandar, 2013).

Dalam Werimon (2005), transparansi mencakup informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi merupakan salah satu prinsip *good governance*.

Berdasarkan hasil penelitian Silvi (2014) menyimpulkan bahwa transparansi publik mampu memoderasi hubungan kapasitas

sumber daya manusia, perencanaan anggaran, poltik penganggaran terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Oleh karena itu, hipotesis keempat, kelima dan keenam dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H₄: Transparansi publik mampu memoderasi hubungan Kapasitas Sumber Daya manusia terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

H₅: Transparansi Publik mampu memoderasi hubungan perencanaan angaran terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

H₆: Transparansi Publik mampu memoderasi hubungan politik penganggaran terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

METODE PENELITIAN

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pegawai negeri sipil yang bekerja pada SKPD Kota Pekanbaru, yang terdiri dari sekretariat daerah dan sekretariat DPRD, 2 kantor, 1 inspektorat Kota, 10 badan, dan 17 dinas. Pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu (*judgement sampling*) melibatkan pemilihan subjek yang berada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang diinginkan (Sekaran, 2006: 137). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada responden. Metode analisis data yang digunakan ada dua yaitu analisis regresi linier berganda dan analisis regresi variabel moderating dengan uji interaksi. Persamaan

regresi linear berganda untuk H_1 , H_2 , H_3 , sebagai berikut:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Sedangkan persamaan analisis regresi variabel moderating, yaitu:

$$H_4 \quad Y = \alpha + b_1X_1 + b_1X_4 + b_1X_1X_4$$

$$H_5 \quad Y = \alpha + b_2X_2 + b_2X_4 + b_2X_2X_4$$

$$H_6 \quad Y = \alpha + b_3X_3 + b_3X_4 + b_3X_3X_4$$

Keterangan:

Y = Sinkronisasi APBD dengan Dokumen KUA-PPAS

X_1 = Kapasitas Sumber Daya Manusia

X_2 = Perencanaan Anggaran

X_3 = Politik Penganggaran

X_4 = Transparansi Publik

α = Konstanta

b = Koefisien Regresi

e = Error

Defenisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Sinkronisasi Dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS (Y)

Sinkronisasi adalah hasil kesesuaian antara dokumen kebijakan yang satu dengan dokumen kebijakan yang lain. Tujuan dari sinkronisasi adalah untuk mengimplementasikan landasan pengaturan tentang mekanisme penyusunan anggaran yang telah diatur dalam sejumlah peraturan perundang-undangan (Arniati, 2010).

Adapun indikator sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS dalam penelitian ini adalah (Iskandar, 2013): (1) Adanya kesesuaian antara dokumen APBD dan dokumen KUA PPAS. (2) Pergeseran anggaran pada KUA-PPAS didasarkan atas regulasi keuangan daerah. Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner dengan skala likert.

Kapasitas Sumber Daya Manusia (X_1)

Kapasitas Sumber Daya Manusia (X_1) merupakan kemampuan dari anggota eksekutif maupun legislatif dalam menjalankan fungsi dan perannya masing-masing dalam proses penyusunan kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah (Iskandar, 2013).

Indikator Kapasitas sumber daya manusia dalam penelitian ini adalah (Iskandar, 2013): (1) Pengetahuan tentang penyusunan anggaran. (2) Pemahaman dalam menyusun anggaran. (3) Kemampuan dan keterampilan menyusun anggaran.

Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner skala 5 point untuk menunjukkan sejauh mana kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

Perencanaan Anggaran (X_2)

Perencanaan merupakan cara organisasi menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Perencanaan meliputi aktivitas yang sifatnya strategis, taktis, dan melibatkan aspek operasional. Proses perencanaan juga melibatkan aspek perilaku, yaitu partisipasi dalam pengembangan system perencanaan, penetapan tujuan, dan pemilihan alat yang paling tepat untuk memonitor perkembangan pencapaian tujuan (Iskandar, 2013).

Indikator variabel perencanaan anggaran dalam penelitian ini adalah (Iskandar, 2013): (1) Penyusunan anggaran diawali dari pelaksanaan musrenbang. (2) Penyusunan anggaran dilakukan melalui proses yang terkoordinasi.

Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner skala 5 point untuk menunjukkan

sejauh mana perencanaan anggaran berpengaruh terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

Politik Penganggaran (X_3)

Politik penganggaran (X_3) adalah cara bagaimana mencapai tujuan yang bersifat kolektif dan mengikat melalui kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik, alokasi dan distribusi dalam proses penerjemahan rencana aktivitas ke dalam rencana keuangan (Arniati, 2010).

Indikator variabel politik penganggaran dalam penelitian ini adalah (Iskandar, 2013): (1) Adanya unsur kepentingan pada saat penyusunan anggaran. (2) Adanya bergaining antara eksekutif dan legislatif pada saat penyusunan anggaran.

Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner skala 5 point untuk menunjukkan sejauh mana politik penganggaran berpengaruh terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

Variabel Moderating (X_4)

Transparansi publik merupakan salah satu prinsip *good governance*. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat di mengerti dan dipantau. Transparansi Publik adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat (Iskandar, 2013).

Indikator variabel Transparansi Publik dalam penelitian ini adalah (Iskandar, 2013): (1) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran. (2) Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses. (3) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu. (4) Terakomodasinya suara/usulan rakyat. (5) Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik.

Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen kuesioner skala 5 point untuk menunjukkan sejauh mana transparansi publik mampu memoderasi pengaruh variabel independen terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Data Penelitian

Kuesioner dibagikan kepada 32 SKPD Pemerintah Kota Pekanbaru dengan 96 orang responden. Dari 96 kuesioner yang dibagikan, terdapat 9 kuesioner (9.38%) tidak dikembalikan oleh responden karena pada saat pengumpulan kuesioner, peneliti tidak berjumpa dengan responden. Dengan demikian sampel akhir dalam penelitian ini sebanyak 87 orang.

Karakteristik Responden Penelitian

Responden berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibanding jenis kelamin laki-laki. Untuk klasifikasi umur mayoritas responden berada pada umur 41-50 tahun. Tingkat jabatan mayoritas responden berada di tingkat Eselon IV (Kasubbag Keuangan dan Kasubbag Penyusunan Program). Tingkat mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan strata 1 (S_1).

Hasil Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan oleh peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan daftar demografi responden.

Tabel 1
Statistik Deskriptif

Variabel	Aktual		
	Kisaran	Mean	Std. Deviasi
Sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS (Y)	8-20	14,4713	2,35184
Kapasitas Sumber Daya Manusia (X_1)	18-45	33,0460	4,13973
Perencanaan Anggaran (X_2)	20-44	33,9655	4,06759
Politik Penganggaran (X_3)	25-55	40,6782	6,76945
Transparansi Publik (Z)	12-25	19,6322	2,60641

Sumber: Data Olahan SPSS, 2015

Hasil Uji Validitas Data

Dalam penelitian ini jumlah kuesioner yang dapat diolah 87 sehingga $df = n-2$ ($87-2$) = 85, sehingga didapat r tabel untuk df (85) = 0,211. Berdasarkan hasil uji validitas menggunakan SPSS 20, seluruh item pertanyaan dari masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah valid ($r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$).

Hasil Uji Reliabilitas Data

Untuk mengukur konsistensi variabel penelitian ini, uji yang dilakukan adalah Uji Reliabilitas dengan menggunakan uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Secara umum, keandalan kurang dari 0,60 dianggap buruk, keandalan dalam kisaran 0,70 bisa diterima dan lebih dari 0,80 adalah baik (Sekaran, 2006: 182). Berdasarkan hasil uji reliabilitas

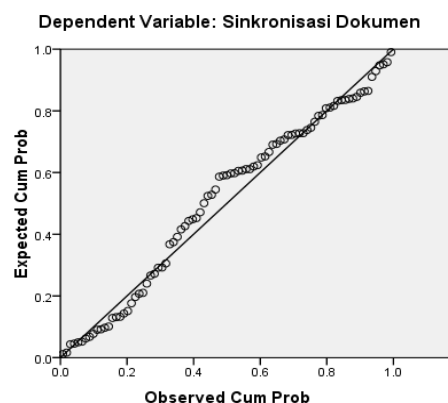
menggunakan SPSS 20, seluruh item pertanyaan dari masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah reliabel (*cronbach's alpha* > 0,60).

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas Data

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2013:161). Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *Normal Probability Plot*.

Gambar 1
Normal P.Plot of Regression Standardized Residual



Selain *Normal Probability Plot* penelitian ini juga menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov*. Diketahui nilai *P value (Asymp.Sig)* sebesar 0,181 > 0,05, artinya model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Hasil Uji Multikolinearitas

Suatu variabel dikatakan bebas dari penyimpangan multikolinieritas, apabila nilai *tolerance* diantara 0.1-1.0, dan nilai

VIF diantara 1.0-10. Keseluruhan nilai tolerance yang dihasilkan dalam penelitian ini berada diantara 0.1-1.0, dan nilai VIF diantara 1.0-10. Sehingga disimpulkan bahwa keseluruhan variabel bebas yang digunakan dalam penelitian terbebas dari asumsi multikolinieritas.

Tabel 2
Hasil Uji Multikolinieritas

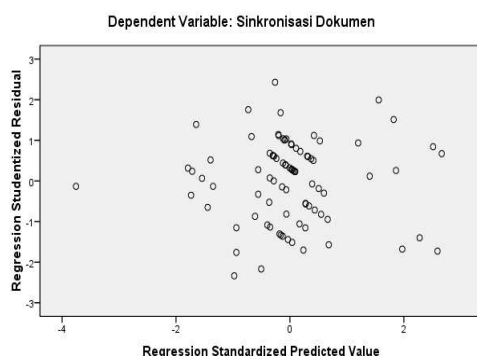
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Kapasitas Sumber Daya Manusia	.399	2.508
Perencanaan Anggaran	.446	2.242
Politik Penganggaran	.743	1.345
Transparansi Publik	.514	1.945

Sumber: Data Olahan SPSS, 2015

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat grafik Plot (*Scatterplot*) antara nilai prediksi variabel terikat (*ZPRED*) dengan residual (*SRESID*). Jika grafik plot menunjukkan suatu pola titik yang bergelombang atau melebar kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Namun, jika tidak ada pola yang jelas, serai titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:139).

Gambar 2
ScatterPlot



Pengujian Hipotesis

Analisis Regresi Berganda

Hasil analisis regresi berganda yang diolah dengan program SPSS, untuk H_1 , H_2 dan H_3 :

Tabel 3

Hasil Analisis Regresi Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	T	Sig.
(Constant)	.023	1.772		.013	.990
Kapasitas Sumber Daya Manusia	.183	.070	.323	2.631	
Perencanaan Anggaran	.132	.064	.229	2.060	.043
Politik Penganggaran	.096	.032	.276	2.951	.004

Sumber: Data Olahan SPSS, 2015

Dari hasil uji regresi tersebut, persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,023 + 0,183X_1 + 0,132X_2 + 0,096X_3 + e$$

Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS (H_1)

Dari hasil perhitungan SPSS 20.0 for windows, diperoleh nilai t_{hitung} 2,631 > t_{tabel} 1,989, t_{tabel} ($\alpha = 0,05$ dan $df = 83$) dan signifikansi sebesar 0,010 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Dari hasil pengujian tersebut, dapat disimpulkan kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS, sehingga hipotesis 1 diterima. Artinya semakin baik kapasitas sumber daya yang dimiliki dalam menyusun APBD maka sinkronisasi

dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS juga meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Iskandar (2013) yang menyimpulkan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Arniati (2010) yang menyimpulkan kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS (H_2)

Dari hasil perhitungan SPSS 20.0 *for windows*, diperoleh nilai $t_{hitung} 2,060 > t_{tabel} 1,989$, $t_{tabel} (\alpha = 0,05 \text{ dan } df = 83)$ dan signifikansi sebesar 0,043 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Dari data tersebut, dapat disimpulkan perencanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS, sehingga hipotesis 2 diterima. Artinya semakin baik perencanaan anggaran maka sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS semakin sinkron.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Iskandar (2013) yang membuktikan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Arniati (2010), yang menyimpulkan perencanaan anggaran tidak berpengaruh dengan sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

Pengaruh Politik Penganggaran Terhadap Sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS (H_3)

Dari hasil perhitungan SPSS 20.0 *for windows*, diperoleh nilai $t_{hitung} 2,951 > t_{tabel} 1,989$, $t_{tabel} (\alpha = 0,05 \text{ dan } df = 83)$ dan signifikansi sebesar 0,004 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Dari data tersebut dapat disimpulkan politik penganggaran berpengaruh signifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS, sehingga hipotesis 3 diterima. Artinya semakin baik hubungan politik antar legislatif dan eksekutif dalam menyusun anggaran tanpa mementingkan kepentingan pribadinya dan sesuai dengan hasil Musrenbang, maka dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS akan semakin sinkron.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Iskandar (2013) dan Silvi (2014) yang menyimpulkan bahwa politik penganggaran berpengaruh terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Sebaliknya bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Arniati (2010), yang menyatakan bahwa politik penganggaran tidak berpengaruh terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel

independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen

Tabel 4
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.678 ^a	.460	.441	1.75898

Sumber: Data Olahan SPSS, 2015

Dari tabel diatas diketahui nilai R Square sebesar 0,460. Artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS adalah sebesar 46 %. Sedangkan sisanya 54 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

Analisis regresi variabel moderating dengan metode interaksi

Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS dengan Transparansi Publik sebagai Variabel Moderating

Hasil analisis regresi variabel moderating untuk H_4 :

Tabel 5
Hasil Analisis Regresi Moderat1

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	5.816	7.083		.821	.414
Kapasitas Sumber Daya Manusia	.077	.224	.135	.343	.733

Transparansi Publik	.046	.369	.051	.126	.900
KSDM*TP	.008	.011	.504	.716	.476

Sumber: Data Olahan SPSS, 2015

Dari tabel diatas dihasilkan persamaan regresi sebagai berikut:
Sinkronisasi Dok. APBD dengan dok. KUA-PPAS = 5,816 – 0,077 Kapasitas sumber daya manusia + 0,046 Transparansi Publik + 0,008 KSDM*TP + e

Dari tabel diatas, nilai t_{hitung} moderat1 sebesar 0,716 dengan nilai signifikansi sebesar 0,476. Sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1,989 pada tingkat signifikansi 5%. Dengan demikian, t_{hitung} (0,716) < t_{tabel} (1,989) dengan signifikansi (0,476) > (0,05).

Jadi dapat dikatakan H_4 ditolak artinya transparansi publik tidak mampu memoderasi hubungan kapasitas sumber daya manusia terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Iskandar (2013). Berbeda dengan hasil penelitian Silvi (2014) yang menemukan bahwa transparansi publik mampu memoderasi hubungan perencanaan anggaran terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

Pengaruh perencanaan anggaran terhadap Sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS dengan Transparansi Publik sebagai Variabel Moderating

Hasil analisis regresi variabel moderating untuk H_5 :

Tabel 6
Hasil Analisis Regresi Moderat2

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	-1.077	8.488		-.127	.899
Perencanaan Anggaran	.241	.265	.417	.912	.364
Transparansi Publik	.539	.445	.598	1.212	.229
PA*TP	-.005	.013	-.306	-.363	.717

Sumber: Data Olahan SPSS, 2015

Dari tabel diatas dihasilkan persamaan regresi sebagai berikut:
Sinkronisasi Dok. APBD dengan dok. KUA-PPAS = -1,077 + 0,241 Perencanaan Anggaran + 0,539 Transparansi Publik - 0,005 PA*TP + e

Berdasarkan data pada tabel 4.12, nilai t_{hitung} moderat2 sebesar -0,363 dengan nilai signifikansi sebesar 0,717. Sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1,989 pada tingkat signifikansi 5%. Dengan demikian, $t_{hitung} (-0,363) < t_{tabel} (1,989)$ dengan signifikansi $(0,717) > (0,05)$.

Jadi dapat dikatakan H_5 ditolak artinya transparansi publik tidak mampu memoderasi hubungan antara perencanaan anggaran terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Iskandar (2013). Penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Silvi (2014) yang menyimpulkan transparansi mampu memoderasi hubungan perencanaan anggaran terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

Pengaruh politik penganggaran terhadap Sinkronisasi Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS dengan Transparansi Publik sebagai Variabel Moderating

Hasil analisis regresi variabel moderating untuk H_6 :

Tabel 7
Hasil Analisis Regresi Moderat3

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	-3.062	7.002		-.437	.663
Politik Penganggaran	.225	.172	.648	1.305	.195
Transparansi Publik	.635	.346	.704	1.835	.070
PP*TP	-.005	.008	-.433	-.609	.544

Sumber: Data Olahan SPSS, 2015

Dari tabel diatas dihasilkan persamaan regresi sebagai berikut:
Sinkronisasi Dok. APBD dengan dok. KUA-PPAS = -3,062 + 0,225 Perencanaan Anggaran + 0,635 Transparansi Publik - 0,05 PP*TP + e

Dari tabel diatas, nilai t_{hitung} moderat3 sebesar -1,350 dengan nilai signifikansi sebesar 0,181. Sedangkan nilai t_{tabel} sebesar 1,990 pada tingkat signifikansi 5%. Dengan demikian, $t_{hitung} (-0,609) < t_{tabel} (1,989)$ dengan signifikansi $(0,544) > (0,05)$.

Jadi dapat dikatakan H_6 ditolak artinya transparansi publik tidak mampu memoderasi hubungan antara politik penganggaran terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Iskandar (2013). Penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Silvi (2014) yang

menyimpulkan transparansi mampu memoderasi hubungan politik penganggaran terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) Moderating

Hasil Uji Koefisien determinasi untuk variabel moderating dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) Moderating

Model Summary				
Mod erat	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.673 ^a	.453	.433	1.77101
2	.622 ^a	.387	.365	1.87416
3	.678 ^a	.460	.441	1.75907

Sumber: Data Olahan SPSS, 2015

Dari tabel 8 tersebut dapat diketahui bahwa sumbangan pengaruh variabel kapasitas sumber daya manusia yang dimoderasi oleh transparansi publik terhadap variabel sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS adalah sebesar 45,3 %. Sedangkan sisanya 54,7 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

Sumbangan pengaruh variabel perencanaan anggaran yang dimoderasi oleh transparansi publik terhadap variabel sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS adalah sebesar 38,7 %. Sedangkan sisanya 61,3 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

Sumbangan pengaruh variabel politik penganggaran yang dimoderasi oleh transparansi publik terhadap variabel sinkronisasi

dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS adalah sebesar 46 %. Sedangkan sisanya 54 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menyimpulkan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua menyimpulkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh signifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menyimpulkan bahwa politik penganggaran berpengaruh signifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.
4. Hasil pengujian hipotesis keempat menyimpulkan bahwa transparansi publik tidak mampu memoderasi hubungan antara kapasitas sumber daya manusia terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.
5. Hasil pengujian hipotesis kelima menyimpulkan bahwa transparansi publik tidak mampu memoderasi hubungan antara perencanaan anggaran terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

6. Hasil pengujian hipotesis kelima menyimpulkan bahwa transparansi publik tidak mampu memoderasi hubungan antara politik penganggaran terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.
7. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen diantaranya: kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran, politik penganggaran dimana variabel ini hanya mampu menjelaskan atau mempengaruhi sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS.

Saran

Peneliti selanjutnya menambah variabel yang diukur bisa diperluas lagi dengan menambah variabel-variabel lainnya yang dapat mempengaruhi sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS, serta mencari variabel moderating lain yang dapat memoderasi hubungan antara kapasitas sumber daya manusia, perencanaan anggaran dan politik penganggaran terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Menambahkan data responden lebih dari 96 dan diperluas ke kabupaten /kota lainnya sehingga memungkinkan hasilnya akan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arniati, dkk. 2010. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Politik Penganggaran, Perencanaan dan Informasi Pendukung terhadap Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang. *Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XIII* 16-17 Oktober di Purwokerto.
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Dinas Pendapatan Pekanbaru. 2014. APBD Pekanbaru 2014 berubah dari 2,42 T Menjadi 2,7 Triliun. (<http://dipenda.pekanbaru.go.id/apbd-pekanbaru-2014-berubah-dari-242-menjadi-27-triliun/>).
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2011. *Structural Equation Modelling Metode Alternatif dengan Partial Least Square*: Edisi 3. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Iskandar, Dudi. 2013. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan dan Politik Penganggaran, dengan transparansi Publik sebagai Variabel Moderating terhadap Dokumen APBD dengan

Dokumen KUA-PPAS pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara. *Jurnal Telaah dan Riset Akuntansi* Vol. 6 No.1 Januari 2013.

Rasyid, Abdul. 2013. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Sinkronisasi Dokumen RKPD dengan Dokumen APBD. *Jurnal Publikasi*. Papua: Universitas Yapis.

Sekaran, Uma. 2006. *Research Methods for Business (Metodologi Penelitian untuk Bisnis)* edisi 4 buku 1. Jakarta: Salemba Empat.

Sihabudin, Muammar. 2013. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Politik Penganggaran, Perencanaan dan Informasi Pendukung terhadap Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS (Studi pada SKPD di Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati). Kudus: Universitas Muria Kudus. *Skripsi publikasi*.

Silvi, dkk. 2014. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan dan Politik Penganggaran, dengan transparansi Publik sebagai Variabel Moderating terhadap Dokumen APBD dengan Dokumen KUA-PPAS pada Kota Padang.

Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Werimon, Simson. 2005. Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan

Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). *Thesis Publikasi*. Semarang: Universitas Diponegoro.